

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Anggi¹, M.Thoyib², Eka Jumarni Fithri³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : anggiangraini@gmail.com, thoyibm12@gmail.com, ekajf.2f@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini terbatas pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Studi ini mengandalkan sumber-sumber sekunder untuk datanya. Laporan pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang diterima dari website Kementerian Keuangan memberikan data penelitian (djpk.kemenkeu.go.id). Di Provinsi Sumatera Selatan, 18 Kabupaten/Kota telah mencatat total 90 observasi antara tahun 2016 dan 2020. (lima tahun). SPSS versi 26 digunakan untuk menganalisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan temuan, belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, belanja barang dan jasa, serta belanja modal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pertumbuhan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Abstract: This study aims to analyze the influence of social assistance expenditures, unforeseen expenses, goods and services expenditures, and capital expenditures on the performance of regional financial management in South Sumatra Province districts/cities. This study is confined to districts and cities in the province of South Sumatra. The study relies on secondary sources for its data. South Sumatra Province Regency/City budget execution reports received from the Ministry of Finance's website provided the study's data (djpk.kemenkeu.go.id). In South Sumatra Province, 18 Regencies/Cities have recorded a total of 90 observations between 2016 and 2020. (five years). SPSS version 26 was used to analyze the data using multiple linear regression. According to the findings, social assistance expenditures, unforeseen expenses, goods and services expenditures, and capital expenditures affected the of regional financial management.

Keywords: Regional Expenditures, Regional Financial Management Performance Growth.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2022 di Indonesia ditandai dengan gelombang baru kasus covid-19 akibat merebaknya Varian Omicron, Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik lagi, karena diketahui pada tahun 2021 perekonomian Indonesia akan membaik dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 Covid-19 19 meningkat lagi karena munculnya varian tipe baru yaitu Omicron yang menghambat pemulihan ekonomi. Menurut technical brief WHO tertanggal 23 Desember 2021, tingkat penularan varian Omicron lebih cepat dibandingkan varian covid-19 sebelumnya. Varian Omicron dikhawatirkan menyebabkan penurunan imunitas dan efektivitas vaksin, serta bukti awal peningkatan risiko infeksi ulang dibandingkan varian lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan berbagai aktivitas di luar rumah, klaim (cnbcindonesia.com, 2020). Hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana anggarannya. Hal ini juga mengurangi mobilitas masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Meski demikian, beberapa pemerintah daerah Sumatera Selatan menyadari tingkat belanja yang relatif rendah. Banyak pemerintah kota yang belum pulih 50% dari pengeluarannya hingga September 2021. (Mediaindonesia.com, 2022) mengatakan “Belanja pemerintah adalah salah satu kunci kebangkitan ekonomi ini, menurut Lydia Kurniawati Christyana, Kepala DJPb Sumsel Kanwil. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah daerah untuk segera mengakui belanja daerah, khususnya untuk produk dan jasa. Menkeu mengatakan, “Diproyeksikan belanja modal akan mengalami perlambatan karena krisis Covid-19 dan penekanan diberikan pada kesehatan, belanja bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.”

Pandemi ini mungkin memerlukan lokasi segera dan berbagai persyaratan perawatan karena ancaman yang ditimbulkan oleh Varian Omicron, yang memerlukan tindakan cepat untuk menghentikan penyebaran penyakit. Untuk mempersiapkannya, pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi belanja daerah, terutama belanja tak terduga. Pengeluaran anggaran dalam APBD untuk keperluan darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak terduga, adalah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Gatra.com, 2022) melaporkan “Menurut Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah provinsi kabupaten/kota harus mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) untuk tahun terakhir (TA) 2022 yaitu antara 5 dan 10 persen dari APBD tahun terakhir (TA) 2021 untuk persiapan keadaan darurat, seperti kebutuhan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana tak terduga lainnya.

“Kepala Kanwil DJPb Sumsel, mengatakan secara total realisasi pendapatan APBD Sumsel masih lebih besar dari realisasi belanja,” demikian laporan dari (mediaindonesia.com, 2022). dimana total pendapatan sebesar 25,3 triliun rupiah. Namun realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp 21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang belum tersalurkan ke kas daerah. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam mengelola keuangan daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat bergerak cepat di tengah kondisi pertumbuhan yang lambat saat ini.

Penulis tertarik untuk menentukan besaran mana yang akan terkena dampak Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, berdasarkan konteks yang diuraikan di atas. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut (PMK No. 102/PMK.02/2018), Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kehidupan seseorang yang disfungsi secara sosial. kemampuan untuk melakukan fungsi sosial. Menurut penelitian Rahman dkk, belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial berdampak pada Pertumbuhan Kinerja. Dari uraian tersebut, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Kinerja.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak wajar atau tidak diharapkan terulang, seperti penanggulangan bencana alam dan sosial yang tidak diantisipasi sebelumnya, serta pengembalian kelebihan remitansi daerah. Menurut penelitian Rahman dkk, belanja tidak langsung berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Tak Terduga berdampak pada Pertumbuhan Kinerja. Menggunakan definisi ini, hipotesis berikut ini:

H₂ : Diduga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan Belanja Tidak Terduga terhadap Pertumbuhan Kinerja.

Dimasa pandemi ini masyarakat membutuhkan barang dan jasa akibat dibutuhkannya obat-obatan, vitamin dan jasa para medis untuk kesehatan. Dengan merealisasikannya anggaran yang ada suatu daerah diharapkan dapat menyokong kebutuhan ekonomi. Menurut penelitian Lathifa H (2019), belanja barang dan jasa memberikan dampak yang menguntungkan bagi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2013-2017. Oleh karena itu, kesimpulan dari hipotesis adalah sebagai berikut:

H₃ : Diduga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran, akan menambah kekayaan atau kekayaan daerah, dan juga akan meningkatkan belanja pemeliharaan rutin seperti biaya pemeliharaan kelompok operasional. Dalam penelitiannya, Yasin M. et al. (2017) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berdampak positif terhadap Pertumbuhan Kinerja. Kemudian berikut kesimpulannya:

H₄ : Diduga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja.

Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dana daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya mengelola keuangan daerah secara teratur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, murah, efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kepatuhan, dan kemaslahatan masyarakat. Untuk memenuhi manfaat masyarakat pada sekarang ini hendaknya pemerintah daerah secepatnya merealisasikan anggaran yang ada, mengingat kondisi masyarakat saat ini sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah akibat covid-19 kembali meningkat dan keadaan ekonomi memburuk dan kinerja pemerintah daerah terganggu. Di sinilah anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal harus direalisasikan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan ini diharapkan wabab ini segera berakhir dan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dapat mengelola anggaran daerahnya dengan lebih efektif. Maka kesimpulan dari hipotesis tersebut adalah:

H₅ : Dihipotesiskan bahwa Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal berpengaruh positif dan cukup besar terhadap Pertumbuhan Kinerja.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif. Pengumpulan data sekunder ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dari website Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id).

Populasi dan Sampel Penelitian

Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Metode analisis data ini menggunakan SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t-statistik digunakan untuk menentukan, dalam istilah yang paling dasar, sejauh mana pengaruh dari satu variabel penjelas atau variabel independen dapat secara independen menjelaskan varians dalam variabel dependen. Dalam pengujian ini ditetapkan ketentuan bahwa jika t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen. Nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan $df = n-k-1$ atau $90-4-1=85$, dan hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 1,988. Dan hipotesis dapat diterima jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji t ditampilkan pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	7010937.772	3168452.460		2.213	.030
	Belanja Bantuan Sosial (X1)	.945	.112	.102	8.400	.000
	Belanja Tidak Terduga (X2)	1.002	.027	.652	37.271	.000
	Belanja Barang & Jasa (X3)	1.015	.037	.424	27.092	.000
	Belanja Modal (X4)	.815	.025	.110	6.599	.001

a. Dependent Variable: PAD (Y)

Sumber : Output SPSS

Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (Uji Statistik F)

Uji statistik F menguji hipotesis bahwa b_1 , b_2 , b_3 , dan b_4 semuanya sama dengan nol secara bersamaan. Jenis pengujian hipotesis ini dikenal sebagai uji signifikansi keseluruhan dari garis regresi yang diamati dan diperkirakan, yang menentukan apakah Y terhubung secara linier dengan X1, X2, X3, atau X4. Dalam pengujian simultan ini disyaratkan bahwa jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka hipotesis dapat diterima, yaitu semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Nilai f-tabel dapat dilihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 4 (n-k-1) atau $90-4-1 = 85$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), hasil yang diperoleh untuk F-tabel sebesar 2,48 (lihat lampiran uji F). Selain itu, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, ada kemungkinan hipotesis tersebut benar. Tabel berikut menyajikan temuan dari uji statistik F untuk Anda teliti:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116294849500000 0000.000	4	290737123900000 000.000	1777.307	.000 ^b
	Residual	139045532600000 00.000	85	163582979600000 .000		
	Total	117685304900000 0000.000	89			

a. Dependent Variable: PAD (Y)

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal (X4), Belanja Bantuan Sosial (X1), Belanja Barang & Jasa

Sumber : Output SPSS

Belanja Bantuan Sosial secara parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja

Nilai 8,400 ditetapkan sebagai t-hitung untuk variabel belanja bansos setelah hasil uji t parsial dianalisis. Karena nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel yang diperoleh (8.400 lebih tinggi dari 1.988), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel belanja bansos berpengaruh positif dan signifikan, paling tidak sebagian, pada variabel pendapatan asli daerah.

Belanja Tidak Terduga secara parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja

Berdasarkan hasil uji-t, yang juga dikenal sebagai uji parsial, nilai t-hitung untuk variabel yang mewakili pengeluaran tak terduga adalah 37,271. Karena nilai t-hitung yang dihasilkan lebih tinggi dari nilai t-tabel (37,271 lebih tinggi dari 1,988), dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang mewakili pengeluaran tak terduga memiliki pengaruh positif dan substansial, setidaknya sebagian, terhadap variabel yang mewakili pendapatan daerah.

Belanja Barang & Jasa secara parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja

Nilai t-hitung untuk variabel pengeluaran barang dan jasa ditentukan sebesar 27.092 berdasarkan hasil uji t yang merupakan uji parsial. Karena nilai yang diperoleh untuk t-hitung lebih tinggi dari nilai yang diperoleh untuk t-tabel (27,092 lebih tinggi dari 1,988), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengeluaran barang dan jasa berpengaruh positif dan pengaruh yang signifikan, setidaknya sebagian, terhadap variabel pendapatan asli daerah.

Belanja Modal secara parsial berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja

Berdasarkan hasil uji-t, yang juga dikenal sebagai uji parsial, nilai t-hitung untuk variabel belanja modal adalah 6,599. Karena nilai t-hitung yang dihasilkan lebih tinggi dari nilai t-tabel (6,599 lebih tinggi dari 1,988), dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang berkaitan dengan belanja modal memiliki pengaruh positif dan substansial, setidaknya sebagian, terhadap variabel yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Kinerja

Uji F secara simultan diperoleh hasil sebagai berikut: nilai F-hitung sebesar 1.773.007 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil uji F. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja bansos, belanja tak terduga, belanja barang dan jasa, dan belanja modal semuanya berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah va.

SIMPULAN

Setelah pengujian data dan pemeriksaan temuan pengujian yang disajikan dalam bab sebelumnya, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Belanja bantuan sosial per Kabupaten/Kota, belanja tak terduga per Kabupaten/Kota, belanja barang dan jasa per Kabupaten/Kota, dan belanja modal per Kabupaten/Kota semuanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang secara parsial positif dan signifikan.
2. Terdapat hubungan yang signifikan antara belanja bantuan sosial per Kabupaten/Kota, belanja tak terduga per Kabupaten/Kota, belanja barang dan jasa per Kabupaten/Kota, dan belanja modal per Kabupaten/Kota.
3. Belanja bantuan sosial per Kabupaten/Kota, belanja tak terduga per Kabupaten/Kota, belanja barang dan jasa per Kabupaten/Kota, dan belanja modal per Kabupaten/Kota memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi pertumbuhan kinerja per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Belanja Bantuan Sosial merupakan jenis belanja yang paling penting dan dominan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja masing-masing kabupaten dan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN.
- Fauzi, F., Basyith Dencik, A., & Isnaini Asiati, D. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perdana K, E. (2016). *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 24*. (1st ed.). Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen Fe UBB.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.*
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Aam Amaliyah (2017). "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian (Profile) Keuangan Daerah Pada Kabupaten Serang". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.6 No.3 hal 87-88.
- Anidar, dk (2019). "Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa". *Jurnal Samudera Ekonomika*, Vol.3, No.1 hal 17.
- Lathifa H (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017". *Journal Of Accounting Diponegoro*. Vol.8, No.2 hal 7-8.
- Yasin M, dkk (2017). "Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota se-Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.2, No.2 hal 506-507.
- Yudi R, Dkk (2021). " Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol.8, No.1 hal 56-57.
- Bps.go.id (2022). *Badan Pusat Statistik : Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi(Persen),2021-22*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html> / Diakses Februari 2022.
- Cnbcindonesia.com (2022). *Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia : Omicron Mengancam, Jokowi Minta Warga RI Kembali WFH*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220118160759-4-308419/omicron-mengancam-jokowi-minta-warga-ri-kembali-wfh> / Diakses pada 18 Januari 2022.
- Djkn.kemenkeu.go.id (2020), *Kementerian Keuangan : Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> / Diakses pada Tahun 2020.
- Gatra.com (2022). *Yoga Aditya, Gatra : Kemendagri Minta Pemda Tambah Belanja Tidak Terduga di APBD 2022*. <https://www.gatra.com/news-521509-ekonomi-kemendagri-minta-pemda-tambah-belanja-tak-terduga-di-apbd-2022.html> / Diakses pada 02 September 2021.
- Kominfo.go.id (2022). *Kementerian Komunikasi dan Informatika : Dukung Pemulihan Dunia Kerja, Inilah Upaya Pemerintah 2022*. <https://kominfo.go.id/content/detail/40181/presiden-sampaikan-upaya-pemerintah-dalam-dunia-kerja-yang-berorientasi-pada-dunia-manusia/0/berita> / Diakses pada 23 Februari 2022.
- Menpan.go.id (2021). *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kinerja APBN Baik, Pemulihan Ekonomi Nasional pun Membaik*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kinerja-apbn-baik-pemulihan-ekonomi-nasional-pun-membaik> / Diakses 23 September 2021.

M.mediaindonesia.com (2021). *Dwi Apriani, M. Media Indonesia : Realisasi Belanja Daerah Pemda Di Sumsel Masih Rendah.*
https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/449239-realisasi-belanja-pemda-di-sumsel-masih-rendah / Diakses pada 24 November 2021.